

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN PERDESAAN
MANDIRI DI DESA WAWONDULA KECAMATAN
TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pogram Kawasan Perdesaan
Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Nurul Ainun

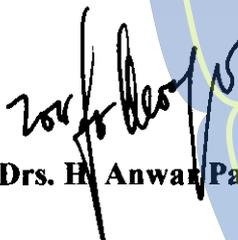
Nomor Stambuk : 10561 11179 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

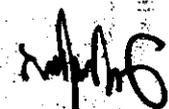

Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si


Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrulhaq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 bulan februari tahun 2021

TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si NBM: 730727
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Abdu Mahsyar, M.Si ()
2. Adnan Ma'ruf S.Sos, M.Si ()
3. Dr. Hafiz Elfiansyah P, S.T, M.Si ()
4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Ainun
Nomor Induk Mahasiswa : 105611117916
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Baso dan Ibu Hapisahi, saudara saya Muh. Ismail, Zulfiana Zaenab, Nurul Asma, Nurul Akifah, Ahmad Absyar, dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si selaku Penasehat akademik
7. Para dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada pegawai dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah menerima dengan baik pada saat penelitian

9. Kepada teman saya Tawakkal Rasbi yang selalu mendukung dalam penyelesaian
10. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu *mensupport* dalam penyusunan Skripsi saya.
11. Saudara-saudara seperjuangan di bangku perkuliahan angkatan 2016 terutama Jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas F yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 09 Februari 2021


Nurul Ainun

ABSTRAK

Nurul Ainun, 2021. Implementasi Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Hafiz Elfiansya Parawu)

Implementasi merupakan suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Dalam implementasi suatu program terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi program. Kajian penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menjelaskan Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendiskripsikan dan menjelaskan implementasi program. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir. Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. (1) Komunikasi dalam tahap ini pemerintah desa (BKAD) dan PT. Vale sudah menjalankan tahap komunikasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik itu ditunjukkan dengan hal yang dipaparkan oleh beberapa informan. (2) Sumber Daya dalam tahap ini pemerintah desa termasuk BKAD dan PT. Vale sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan pernyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan. (3) Disposisi dalam tahap ini pemerintah desa termasuk BKAD dan PT. Vale sudah berjalan dengan baik terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri itu sesuai dengan yang dikatakan dari berbagai sumber baik itu dari PT. Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu sendiri program ini bisa berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik dari semua unsur, dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. (4) Struktur Birokrasi dalam tahap ini pemerintah desa termasuk BKAD dan PT. Vale sudah berjalan dengan baik itu di tunjukkan dengan berbagai sumber baik itu dari PT. Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu sendiri program ini berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik dari semua unsur. Dan dari segi struktur birokrasi semua pihak terkiat ini diberikan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Kata kunci : implementasi program, kawasan perdesaan mandiri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep dan Teori	10
C. Kerangka Pikir	21
D. Fokus Penelitian	22
E. Deskripsi Fokus	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Informan	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Teknik Pengabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	29
B. Hasil Penelitian	35
C. Pembahasan Penelitian	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
------------------------------------	----



sehingga program yang dapat terlaksana juga terbatas. Dengan PKPM maka sistem programnya berubah dimana programnya dahulu yang dibuat lalu menganggarkan dananya sehingga pemerintah desa dapat mengembangkan perekonomian masyarakat.

Hasil penelitian Hady Rangka Loleh (2016) juga menemukan bahwa PKPM bentuk kerjasama pemerintah kabupaten luwu timur dan perusahaan PT. Vale Indonesia tersebut bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum puas terhadap kebijakan tersebut.

Terkait dengan implementasi program PKPM Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu Desa tempat penerapan PKPM, karena di Desa tersebut terdapat potensi yang bisa dikembangkan yaitu perdagangan.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa implementasi PTPM masih kurangnya anggaran sehingga pemerintah desa membuat program baru yaitu PKPM (program kawasan perdesaan mandiri) dan berperan penting dalam mengembangkan potensi desa dalam pengelolaan ekonomi perdagangan di wilayah Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Tanggung jawab CSR terhadap dampak dari keputusan dan kegiatan p a d a masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Menariknya penelitian ini karena dapat melihat implementasi pemberdayaan kawasan perdesaan mandiri (PKPM) dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Administrasi Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat jika peneliti mengangkat judul "Implementasi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah komunikasi PKPM di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimanakah sumber daya PKPM di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?
3. Bagaimanakah disposisi PKPM di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?
4. Bagaimanakah struktur birokrasi PKPM di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komunikasi Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti

Kabupaten Luwu Timur

2. Untuk mengetahui sumber daya Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur .

3. Untuk mengetahui disposisi Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur .

4. Untuk mengetahui struktur birokrasi Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai bahan masukan *Corporate Social Responsibility* dalam pengelolaan Implementasi Program Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) di Desa Wawowndula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

2. Manfaat teoritis

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama tentang Implementasi Program Kawasan Pedesaan Mandiri di Desa Wawowndula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa PKPM merupakan bentuk kerjasama pemerintah kabupaten luwu timur dan perusahaan PT. Vale Indonesia tersebut bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum puas terhadap kebijakan pemerintah.

3. Rasdiah Rasyid (2015). Dengan Judul *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Pada PT. Vale Indonesia Tbk.*

Penelitian ini berfokus pada penerapan program-program CSR PT Vale Indonesia yang tersebar pada berbagai aktivitas utama seperti : Bantuan Ekonomi Terhadap Masyarakat, Pembangunan Irigasi Sebagai Upaya Revitalisasi Lingkungan dan Upaya Memandirikan Masyarakat secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar PT. Vale Indonesia Tbk.

B. Konsep dan Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan, sangat ditentukan oleh strategikebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan yang diturunkan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah dengan masyarakat. Implementasi kebijakan pada intinya akan membahas mengenai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan publik dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan dampak yang diharapkan.

Implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam implementasi suatu program terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi program adapun model-model implementasi program dalam perkembangannya, antara lain yaitu :

a. Model George C Edwards III

Model implementasi kebijakan ini bersifat *top down*. Subarsono (2011:90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksanaan harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik (dalam Agustino, 2006:150-151) terdapat tiga indikator yang dapat mengukur keberhasilan variabel komunikasi :

- *Trnasmis*, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula
- *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- *Konsistensi*, perintah yang diberikan untuk pelaksana suatu kebijakan harus tetap pada pendirian awal dan jelas.

2. Sumber Daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu :

a. *Standard Operasional Procedur (SOP)*

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

b. **Model Van Metter dan Van Horn**

Memiliki enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/kecenderungan (Disposition)

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan

Menurut Agustino (2008:19), implemmtasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu aktivitas atau kagiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Alfatih (2010:2) menyatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik. Dari kedua pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah keputusan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan kesejahteraan publik.

c. Mulyadi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

d. Grindle

Menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu

e. Horn

Mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan

f. Ekawati

Definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya

g. Gordon

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

h. Widodo

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

j. Gunn dan Hoogwood

Mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial

k. Syaukani dkk

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara.

2. Konsep Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM)

PKPM mulai dirancang PT. Vale bersama pemkab Luwu Timur dan perwakilan masyarakat yang kemudian disebut kemitraan tiga pilar. Pola ini memberikan dukungan bagi masyarakat untuk pengembangan masyarakat kawasan dan produk unggulan desa/produk unggulan kawasan. Dengan pola dukungan pengembangan kawasan perdesaan mandiri, program sosial perusahaan nantinya akan dikembangkan dan dilaksanakan sinergis dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi wilayah sesuai potensinya sehingga dapat mempercepat tujuan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

PKPM menerapkan prinsip partisipatif, kemandirian, akuntabilitas, keterpaduan, dan keberpihakan terhadap masyarakat. PKPM bertujuan meningkatkan daya saing, nilai tambah dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah terdampak operasi.

Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemberdayaan perusahaan. PKPM merupakan kontribusi perusahaan, sejalan dengan sustainable development goals (SDGs). PT. Vale menjalankan program masyarakatnya yang disinergiskan dengan roadmap pemerintah daerah.

Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Vale Indonesia Tbk mempertimbangkan aspek pemenuhan AMDAL termasuk rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL), rencana penutupan tambang dan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dan tujuan pembangunan global.

Adapun alur pelaksanaan PKPM sebagai berikut :

a. Penetapan RI-PPM dan kerangka PKPM

Penyusunan dan penetapan RI-PPM, konsultasi dan penetapan rangka PKPM, sosialisasi di empat kecamatan, rangkaian dan penyusunan roadmap pengembangan kawasan dan penetapan.

b. Persiapan kelembagaan

Pembentukan tim koordinasi PPM Kabupaten Luwu Timur, pembentukan tim sekretariat program, dan pembentukan BKAD.

c. Penguatan kapasitas dasar

Pembentukan tim sekretariat program, pembekalan BKAD studi tiru bagi pemerintah desa, BKAD, BUMDES, dan UKM.

d. MOU kemitraan

Penandatanganan Mou dan PKS antara kemendes, Pemprov, Pemkab Luwu Timur, dan PT. Vale dan dilanjutkan dengan PKS antar PT. Vale dan BKAD-TKK untuk pembiayaan organisasi dan pembentukan tim verifikasi, penilaian usulan dan MONEV.

e. Penyusunan dokumen perencanaan kawasan

Penyusunan dan konsultasi RKKP ditingkat desa, kawasan dan daerah oleh BKAD dan TSK, konsultasi dan sinkronisasi RPKP ditingkat provinsi dan pusat oleh PT. Vale dan pemerintah kabupaten.

f. Launching PKPM dan penyerahan rancangan RKKP serta percepatan implementasi 2018-2019

Launching oleh wakil gubernur sulawesi selatan dan penyerahan

birokrasi sebagai indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian Implementasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur maka yang menjadi fokus penelitian yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis akan lebih memfokuskan penelitian dalam implementasi pogram kawsan perdesaan mandiri melalui beberapa poin sebagai berikut :

3. Komunikasi, yaitu nproses penyampaian informasi kepada para pelaksana yang konsisten dan seragam dalam melaksanakan Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula.
4. Disposisi, yakni sikap para pelaksana dalam menerima atau menolak keputusan dalam melaksanakan implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula.
5. Sumber Daya, yakni mengidentifikasi sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dalam melaksanakan Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula.
6. Struktur Birokrasi, melihat proses kerjasama perusahaan dan instansi pemerintah dalam melaksanakan implementasi program CSR serta menjaga transparansi terhadap masyarakat di Desa Wawondula.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di kantor Desa Wawondula, Sekretariat BKAD, serta di kantor CSR PT. Vale. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor Desa Wawondula, Sekretariat BKAD, serta di kantor CSR PT. Vale merupakan instansi yang menangi persoalan Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang menjadiproblem berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dilatar belakang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Arikunto (2013:172) adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah orang yang berkaitan dengan inovasi pelayanan kesehatan melalui Program Rumah Singgah Pasien dan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, koran, buku, dan majalah atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan terpercaya yang telah mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Corporate Social Responsibility. Informan-informan tersebut diantaranya:

Tabel 3.1 informan penelitian

No.	Informan	Kode Informan
1.	Pegawai CSR PT. Vale	INFORMAN A
2.	Kepala Desa Wawondula	INFORMAN B
3.	Sekretaris BKAD	INFORMAN C
4.	Masyarakat Desa Wawondula	INFORMAN D
5.	Bendahara BKAD	INFORMAN E

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Hasanah (2016:26) dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat kondisi di lapangan atau tempat penelitian serta melihat narasumber-narasumber yang akan diwawancara, sehingga penulis dapat lebih mengenal lokasi narasumber yang di wawancara.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber yang mengerti dan paham mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan

alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan antara penulis dengan narasumber, foto digunakan penulis untuk membuktikan bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber serta dokumen untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) kegiatan analisis data terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Kegiatan ini dilakukan peneliti dengan proses penelitian, penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil wawancara di lapangan, yang bertujuan untuk lebih memudahkan penulis dalam melihat hasil wawancara dari berbagai narasumber dan memudahkan pembaca melihat hasil wawancara dengan hasil yang lebih sederhana dan akurat.

2. Penyajian Data

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan data-data informasi hasil wawancara dengan para narasumber yang memiliki kesimpulan dalam setiap pembahasan. Sehingga mempermudah peneliti melihat hal yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil data-data yang diperoleh di lapangan dan dari hasil

penjelasan dari berbagai informan yang di wawancara. Untuk selanjutnya di simpulkan dan dilihat bahwa data tersebut akurat dan dapat dipercaya sesuai kejadian di lapangan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang dapat digunakan proses pengabsahan data hasil penelitian adalah dengan hasil triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari sumber- sumber yang diperoleh yang didapatkan melalui berbagai cara dan waktu menurut William dalam Sugiyono (2015).

1. Triangulasi Sumber

Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk melakukan uji kredibilitas data yang telah dilakukan dengan cara memeriksa data melalui beberapa sumber yang telah diperoleh selama di lapangan.

2. Triangulasi Teknik

Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk menguji data yang dilakukan dengan memeriksa data kepada sumber dengan metode yang berbeda-beda disetiap lokasi penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data juga sering dipengaruhi oleh waktu. Sehingga untuk memperoleh waktu yang ideal dalam meneliti, peneliti yang telah melakukan observasi terlebih dahulu mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan narasumber

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi

Sulawesi Selatan merupakan satu dari 18 desa di Kecamatan Towuti yang Ibu kota Kecamatan dengan jarak \pm 60 Km dari Kota Kabupaten. Secara Geografis Desa Wawondula dengan luas wilayah 24,215 Km, yang berbatasan dengan sebelah utara Desa Asuli, sebelah Timur Desa Pekalooa dan Desa Matompi, sebelah Selatan Desa Langkea Raya, dan sebelah Barat Desa Lioka. Adapun Lokasi *street food* yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

1. Bagan Struktur Organisasi Desa Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Wawondula Kecamatan Towuti

Kabupaten Luwu Timur

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

1. Kepala Desa

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara, keutuhan negara kesatuan RI.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 4) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan
- 8) Menyelenggarakan administrasi desa yang baik
- 9) Melaksanakan dan bertanggung jawabkan keuangan desa
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa yang dapat dibantu oleh lembaga adat desa
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- 13) Membina, mengayomi, dan melsestarian nilai-nilai social

budaya dan adat istiadat

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

16) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat

17) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

18) Laporan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam masyarakat BPD.

19) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas

20) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepada BPD

2. Sekertaris Desa

1) Membrikan saran dan pendapat kepada kepala desa

2) Memimpin mengkordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan skertaris desa

3) Memberikan informasi mengenai keadaan sekertaris desa dan

- 7) Melaksanakan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - 8) Melaksanakan ,megawasi ,serta membina ex.tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.
4. Kepala Urusan Keuangan
- 1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang undangan
 - 2) Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
 - 3) Melakukan kegiatan administrasi,pajak yang di kelola oleh desa
 - 4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa
 - 5) Merencanakan penyusun APBDES untuk di konsultasikan dengan BPD
 - 6) Melaksanakan tugas lain oleh sekretaris desa
5. Kepala Urusan Umum
- 1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksankan tata kearsipan
 - 2) Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemelihaaan dan perbaikan peralatan kantor
 - 3) Menyusun jadwal serta mengikuti plaksanaan perkembangan pelaksanaan piket
 - 4) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan

kantor dan bangunn lain milik desa

- 5) Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum
 - 6) Mencatat inventarisasi kekayaan desa
 - 7) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris desa
6. Kepala Urusan Pembangunan
- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
 - 2) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
 - 3) Mgnhimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan
 - 4) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek /daftar isian kegiatan

B. Hasil Penelitian

Melalui pengembangan suatu Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri, pemerintah kabupaten luwu timur dalam hal ini PT. VALE dan Pemerintah desa melaksanakan koordinasi dengan BKAD yang dibentuk oleh pemerintah desa yang melaksanakan program Kawasan Perdesaan Mandiri.

Berdasarkan suatu perspektif pemerintah yang diputuskan terhadap pemerintah lokal sebagai level pertama dalam pelaksanaan program tersebut. Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, nilai tambah, dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah terdampak operasi. Adapun hasil penelitian terkait implementasi program Kawasan Perdesaan Mandiri yang terdiri dari empat indikator adalah sebagai berikut:

1. komunikasi

komunikasi untuk menuju implementasi program yang diinginkan, maka pelaksanaan harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Adapun pengertian komunikasi secara khusus Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kepada para pelaksana yang konsisten dan seragam dalam melaksanakan Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri di Desa Wawondula. Untuk mengetahui lebih pastinya mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal implementasi program perdesaan mandiri. Berikut ini adalah pernyataan atau hasil wawancara dengan informan A selaku CSR PT Vale adalah sebagai berikut :

sikap para pelaksana dalam memberikan informasi terkait implementasi PKPM

“ya kami selaku CSR PT Vale menerima setiap usulan masyarakat desa terkait program ini yang ditampung kemudian dikomunikasikan secara bersama oleh pemerintah desa dan PT.Vale selaku pemberi dana atau sponsor utama dalam pelaksanaan program tersebut dikawasan perdagangan wilayah kota desa wawondula kecamatan towuti. setelah itu kemudian kami PT. Vale memverifikasi terkait usulan yang di

sampaikan masyarakat desa melalui pemerintah desa, dan jika semua unsur terkait program tersebut terpenuhi barulah PT.Vale bisa mengacukkan program tersebut dan anggaran bisa cairkan sesuai kebutuhan.”(wawancara dengan informan A pada tanggal 7 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dari informan A selaku karyawan CSR PT.Vale yang memberikan informasi yang menunjukkan bahwa komunikasi implementasi program tersebut sudah berjalan dengan baik itu ditunjukkan dengan pemerintah menerima setiap usulan yang disampaikan dari masyarakat kemudian menjaring setiap usulan yang kemudian disampaikan kepada PT Vale untuk diverifikasi. Selanjutnya hasil wawancara dari informan B selaku Kepala Desa:

“sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai program ini saya selaku pemerintah desa dimana program ini lahir dan muncul atas kerisauan masyarakat. Terlepas saya sebagai pemerintah desa yang terkena dampak dengan adanya perusahaan yang ada di wilayah kami oleh karena itu kami membuat program ini semata-mata tujuannya untuk bagaimana masyarakat yang ketergantungan terhadap perusahaan bisa berkurang, yang kedua adapun program CSR PT Vale selama ini sudah berhasil tapi belum maksimal karena adanya batasan anggaran yang dimana PT Vale telah menentukan anggaran sebelum membuat program. Nah dengan PKPM ini diubah tata cara pengelolaannya, programnya dahulu yang dibuat lalu dianggarkan. Dengan inilah program tersebut bisa terbentuk Program Kawasan Perdesaan Mandiri dimana wawodula ini dilihat potensi apa yang bisa dikembangkan yaitu perdagangan.”(wawancara dengan informan B pada tanggal 09 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari informan B selaku kepala Desa Wawondula menunjukkan bahwa komunikasi PKPM yang dibentuk oleh pemerintah desa dan PT Vale yang muncul berdasarkan kerisauan masyarakat yang berada di wilayah lingkaran tambang. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar semata-mata tidak bergantung pada perusahaan. Selaras dengan

pernyataan masyarakat mengenai komunikasi PKPM di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, berikut ini pernyataan atau hasil wawancara dengan informan C selaku masyarakat desa :

“saya selaku masyarakat desa sangat mendukung program PT. Vale dan pemerintah Desa untuk menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang dimana telah menyediakan tempat untuk berdagang bagi kami masyarakat kecil untuk menambah penghasilan, karena masih banyak pedagang kecil seperti kami yang tidak mempunyai lahan untuk berdagang. Saya berharap program seperti ini kedepannya dapat dikembangkan lagi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.”(wawancara dengan informan C pada tanggal 11 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari informan C selaku masyarakat desa Wawondula menunjukkan bahwa komunikasi menyatakan bahwa masyarakat desa sangat mendukung program PT. Vale dan pemerintah Desa untuk menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang dimana telah menyediakan tempat untuk berdagang bagi masyarakat kecil untuk menambah penghasilan, karena masih banyak pedagang kecil yang tidak mempunyai lahan untuk berdagang. program seperti ini kedepannya dapat dikembangkan lagi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi-komunikasi terkait dengan dengan Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri, sudah menjalankan tugasnya dengan baik itu ditunjukkan dengan hal-hal yang dipaparkan oleh beberapa informan. Secara keseluruhan indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik.

kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan untuk pembangunan berbagai infrastruktur publik yang menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Persoalan sumber daya disini PT. Vale selaku pemberi dana utama dari program tersebut. Selanjutnya pernyataan dari informan B selaku Kepala Desa Wawondula masih sama persoalan sumber daya terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

“mengenai sumber daya kami selaku pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut yaitu *street food*. BKAD itu sendiri merupakan tim yang dibentuk dari aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan tersebut”. (wawancara dengan informan B pada tanggal 09 Desember 2020).

Pernyataan atau hasil wawancara dari informan B selaku kepala desa Wawondula dari indikator sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut yaitu *street food*. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan D selaku sekretaris BKAD adalah sebagai berikut :

“kami selaku tim BKAD yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang dilapangan. Bkad akan memeriksa setiap hasil pekerjaan kegiatan dan memberitahukan pelaksanaan kegiatan secara tertulis.”(hasil wawancara

dengan informan D pada tanggal 10 Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan dari informan D selaku tim BKAD mengenai sumber daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim BKAD ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang dilapangan. Itulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang dibentuk oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan pernyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim BKAD.

8. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kegiatan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana kegiatan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Yakni sikap dalam menerima dan menolak putusan dalam melaksanakan implementasi program kawasan perdesaan mandiri. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai disposisi berikut ini pernyataan atau hasil wawancara dari beberapa informan , yang pertama dari informan B selaku Kepala Desa, pernyataannya adalah sebagai berikut:

“kami dari pemerintah desa selalu meninjau dan mengawal pekerjaan yang dilakukan oleh BKAD selaku pelaksanaa. Disini kami juga memantau pekerjaan mereka, begitu pula dengan pihak PT. Vale selaku pemberi dana atau sponsor utama dari program ini, jadi harus ada kerja

tim yang sistematis, sesuai dengan tugasnya masing-masing ,baik dari pihak PT.Vale, pemerintah desa, BKAD, dan dukungan dari masyarakat juga sangat penting agar program ini terealisasi dengan baik”.(wawancara dengan informan B pada tanggal 07 desember 2020)

Pernyataan atau hasil wawancara dari informan B selaku kepala desa Wawondula dari indikator Disposisi mengenai program tersebut, pemerintah desa itu sendiri selalu meninjau dan mengawal pekerjaan yang dilakukan oleh BKAD selaku pelaksanaa. Disini kami juga memantau pekerjaan mereka, begitu pula dengan pihak PT.Vale selaku pemberi dana atau sponsor utama dari program ini, jadi harus ada kerja tim yang sistematis, sesuai dengan tugasnya masing-masing, sejalan dengan hasil wawancara dengan informan D selaku sekertaris BKAD mengenai program ini, hasil wawancaranya ada sebagai berikut:

“kami selaku tim BKAD berkewajiban melaksanakan kegiatan program PKPM sesuai dengan waktu yang ditentukan serta berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung semua tanggung jawab dan biaya yang dikenakan terhadap BKAD. Tim BKAD berwenang melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengen dalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Adapun laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan harian dan mingguan yang berisi kemajuan fisik pekerjaan dalam priode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu di tunjukkan.” (hasil wawancara dengan informan D pada tanggal 10 Desember 2020).

Pernyataan atau hasil wawancara dari informan D selaku sekertaris BKAD dari indikator Disposisi mengenai program tersebut, menyatakan bahwa BKAD berkewajiban melaksanakan kegiatan program PKPM sesuai dengan waktu yang ditentukan serta berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung semua tanggung jawab dan biaya yang dikenakan terhadap BKAD. Tim BKAD

berwenang melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Itulah tadi hasil wawancara dari informan D selaku sekretaris BKAD mengenai Program kawasan perdesaan mandiri, selanjutnya ada pula pernyataan atau hasil wawancara dengan informan E selaku Bendahara BKAD, pernyataannya adalah sebagai berikut :

“kalau dari saya sendiri mengenai program ini hampir sama yang dikatakan oleh sekretaris saya yaitu sekretaris BKAD dalam program ini kami semua selaku pelaksana yaitu Tim BKAD berwenang melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang sedang dikerjakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Jadi semoga kedepannya bisa berjalan sesuai yang diinginkan.”(wawancara dengan informan E pada tanggal 10 desember 2020).

Berdasarkan Pernyataan atau hasil wawancara dari informan E selaku bendahara BKAD dari indikator Disposisi mengenai program tersebut, hampir sama pula yang dikatakan oleh informan sebelumnya menyatakan bahwa BKAD program ini kami semua selaku pelaksana yaitu Tim BKAD berwenang melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang sedang dikerjakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi terkait implementasi program kawasan perdesaan

mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan yang dikatakan dari berbagai sumber baik itu dari PT.Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu sendiri program ini bisa berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik dari semua unsur, dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri.

9. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Melihat proses kerja sama perusahaan dan instansi pemerintah dalam melaksanakan implementasi program csr serta menjaga transparansi terhadap masyarakat di Desa Wawondula Kecamatan towuti kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui lebih pastinya mengenai struktur Birokrasi dalam hal implementasi program perdesaan mandiri, Berikut ini adalah pernyataan atau hasil wawancara dengan informan A selaku karyawan CSR PT.Vale adalah sebagai berikut :

“kami disini selaku pihak CSR PT. Vale mengenai program ini disini PT. Vale hanya sebagai sponsor atau pemberi dana dalam kegiatan tersebut persoalan struktur birokrasi ataupun stuktur pelaksana dalam kegiatan ini kami percayakan penuh kepada desa sebagai pelaksana dimana desa itu sendiri membentuk kepantiaan pelaksana yaitu BKAD. Adapun hal-hal yang tidak saya sebutkan mengenai struktur program tersebut Anda bisa pertanyakan kepada pihak pemerintah desa selaku penanggung jawab penuh dalam program ini.”(Wawancara dengan informan A pada tanggal 07 Desember 2020)

Pernyataan dari informan A selaku karyawan CSR PT.Vale mengenai struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa

Program Kawasan Perdesaan Mandiri dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa dan PT.Vale disini sebagai sponsor utama dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya pernyataan dari informan B selaku Kepala desa Wawondula mengenai struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan program yang kami ajukan yaitu Program Kawasan Perdesaan Mandiri dikawasan pengembangan perdagangan industri olahan dan penunjang kawasan kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk persoalan pekerjaan pembangunan street food towuti comunity center (TCC) maka kami dari pihak pemerintah desa mengajukan permintaan terhadap csr PT. Vale sebagai sponsor utama pendanaan pada program ini merujuk kepada keputusan musyawarah kerja oleh karena itu perusahaan PT. Valesangat relevan untuk menjadi sponsor dalam pembuatan pembangunan Street Food (TCC).”(Wawancara dengan informan B pada tanggal 09 Desember 2020).

Pernyataan dari informan B selaku kepala desa Wawondula mengenai struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa Program Kawasan Perdesaan Mandiri dikawasan pengembangan perdagangan industri olahan dan penunjang kawasan kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk persoalan pekerjaan pembangunan street food.dari pihak pemerintah desa mengajukan permintaan terhadap csr PT. Vale sebagai sponsor utama pendanaan pada program ini merujuk kepada keputusan musyawarah kerja. Selanjutnya pernyataan dari informan C selaku sekertaris BKAD Wawondula mengenai struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah

Mandiri, sudah menjalankan tugasnya dengan baik itu ditunjukkan dengan hal-hal yang dipaparkan oleh beberapa informan. Secara keseluruhan indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapat dari George C Edward III (2010 :97), yang mengatakan bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Sumber Daya juga merupakan keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia selain itu sumber daya juga mengidentifikasi SDM yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dalam melaksanakan implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Implementasi program kawasan perdesaan mandiri yang memberikan informasi menunjukkan bahwa pemerintah desa Wawondula dalam hal sumber daya yang dilakukan oleh CSR PT. Vale ditunjukkan dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan untuk pembangunan berbagai infrastruktur publik yang menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Persoalan sumber daya disini

PT. Vale selaku pemberi dana utama dari program tersebut.

Selain itu, adapun pernyataan lain dari pihak Kepala Desa dari indikator sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut yaitu *street food*.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh tim BKAD mengenai sumber daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim BKAD ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang dilapangan. Itulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang dibentuk oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan pernyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan, dan pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURUL AINUN, dilahirkan di Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 08 bulan Februari tahun 1998. Anak ke-Dua dari Enam bersaudara dari pasangan Baso Thalib dan Hapisah memiliki satu kakak Laki-Laki bernama Muh. Ismail Baso S.Si dan Tiga adik perempuan bernama Zulfiana Zaenab, NurulAsma, Nurul Akifah dan juga Satu adik laki-laki bernama Ahmad Absyar. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Unggulan Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1Towuti pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMAN1Towuti dengan jurusan Sains lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi Ipma Lutim Komisariat Towuti dan organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Raya. Peneliti Aktif sebagai Bendahara umum Ipma Lutim Komisariat Towuti priode 2019-2020 dan sebagai Bidang Humas Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Raya priode 2018-2019.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur".

PT. Vale selaku pemberi dana utama dari program tersebut.

Selain itu, adapun pernyataan lain dari pihak Kepala Desa dari indikator sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut yaitu *street food*.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh tim BKAD mengenai sumber daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim BKAD ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang dilapangan. Itulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang dibentuk oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan pernyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan, dan pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan

PT. Vale selaku pemberi dana utama dari program tersebut.

Selain itu, adapun pernyataan lain dari pihak Kepala Desa dari indikator sumber daya mengenai program tersebut, pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Yang dimana tugas dari BKAD itu sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana dari kegiatan program tersebut yaitu *street food*.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh tim BKAD mengenai sumber daya terkait program kawasan perdesaan mandiri yang dimana tim BKAD ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK (surat perjanjian kerja) yang terpasang dilapangan. Itulah tadi hasil wawancara dari tim BKAD yang dibentuk oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan pernyataan baik dari PT. Vale, pemerintah desa, dan tim BKAD. Seperti dengan PT. Vale melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan, dan pemerintah desa membentuk pelaksana kegiatan dari program kawasan perdesaan mandiri yang dinamakan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan

bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, dan sumberdaya anggaran.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Yakni sikap dalam menerima dan menolak putusan dalam melaksanakan implementasi program kawasan perdesaan mandiri.

Implementasi program kawasan perdesaan mandiri yang memberikan informasi menunjukkan bahwa sikap kepala desa Wawondula selaku pemerintah desa itu sendiri selalu meninjau dan mengawal pekerjaan yang dilakukan oleh BKAD selaku pelaksana. Disini kami juga memantau pekerjaan mereka, begitu pula dengan pihak PT.Vale selaku pemberi dana atau sponsor utama dari program ini, jadi harus ada kerja tim yang sistematis, sesuai dengan tugasnya masing-masing,

Selain itu, adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh sekertaris BKAD, menyatakan bahwa BKAD berkewajiban melaksanakan kegiatan program PKPM sesuai dengan waktu yang ditentukan serta berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung semua tanggung jawab dan biaya yang dikenakan terhadap BKAD. Tim BKAD berwenang melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan untuk menetapkan

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

Adapun pernyataan lain yang dinyatakan oleh bendahara BKAD, hampir sama pula yang dikatakan oleh informan sebelumnya menyatakan bahwa BKAD program ini kami semua selaku pelaksana yaitu Tim BKAD berwenang melakukan pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang sedang dikerjakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengen dalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan yang dikatakan dari berbagai sumber baik itu dari PT.Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu sendiri program ini bisa berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik dari semua unsur, dan juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan pendapat George C Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kecamatan yaitu Desa Wawondula.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Melihat proses kerja sama perusahaan dan instansi pemerintah dalam melaksanakan implementasi program csr serta menjaga transparansi terhadap masyarakat di Desa Wawondula Kecamatan towuti kabupaten Luwu Timur.

Implementasi program kawasan perdesaan mandiri yang memberikan informasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa Program Kawasan Perdesaan Mandiri dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa dan PT. Vale disini sebagai sponsor utama dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, adapun pernyataan lain dari kepala desa Wawondula mengenai struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa Program Kawasan Perdesaan Mandiri dikawasan pengembangan perdagangan industri olahan dan penunjang kawasan kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk persoalan pekerjaan pembangunan street food. Dari pihak pemerintah desa mengajukan permintaan terhadap csr PT. Vale sebagai sponsor utama pendanaan pada program ini merujuk kepada keputusan musyawarah kerja.

Adapun pernyataan lain selaku sekertaris BKAD dari indikator struktur birokrasi mengenai program tersebut, hampir sama pula yang dikatakan oleh

informan sebelumnya menyatakan bahwa BKAD sebagai penanggung jawab dari program kawasan perdesaan mandiri yang ditunjuk langsung atau dibentuk langsung oleh pihak pemerintah desa itu sendiri, jadi jelas disini struktur dari pelimpahan penanggung jawab dari setiap unsur, mulai dari PT.Vale sebagai sponsor utama untuk mendanai program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi terkait implementasi program kawasan perdesaan mandiri sudah berjalan dengan baik itu sesuai dengan yang dikatakan dari berbagai sumber baik itu dari PT.Vale, Pemerintah Desa, dan Tim BKAD itu sendiri program ini bisa berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik dari semua unsur. Dan dari segi struktur birokrasi semua pihak terkait, ini diberikan tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan pendapat George C Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa, demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada saat musyawarah Desa, yang dimana setiap pemerintah desa yang berada di Kecamatan Towuti meminta agar pembangunan *street food* dibangun disemua Desa. Namun hasil musyawarah dari pihak atau elemen yang bersangkutan pada saat penjaringan usulan menyetujui pembangunan *street food* hanya berada di wilayah kota. Karena melihat tempat yang sangat strategis yakni di desa Wandula yang menjadi pusat kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. S., Mahsyar, A., & Malik, I. (2019). Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Studio Kasus Di Kabupaten Bulukumba Dan Takalar). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 22-28.
- Baharuddin, B., Ansari, M. I., & Tahir, N. (2020). Implementasi Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan Dan Gangguan Reproduksi Sapi Di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 515-529.
- ISNANTO, M. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE GRISTANDARDS (Studi Pada PT Vale Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Juba, H. F. (2018). *Pola Komunikasi Public Relations PT. Vale Indonesia Tbk. dalam Membangun Citra Perusahaan Melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Mahsyar, A. MODEL PARTNERSHIP GOVERNANCE DALAM PENERAPAN COMMUNITY DEVELOPMENT. PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs, 250.
- Michiko, F. H. (2019). Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus pemberian Dana CSR melalui Hibah). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3).
- Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta : UPP STIM YKPN Universitas Gadjah Mada.

Rangga Loleh, H (2016). Relasi Negara Bisnis dan Masyarakat (Implementasi Program Terpadu Pengembangan Masyarakat PT. Vale Indonesia Tbk di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Rasyid, R. (2015). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR PADA PT. VALE INDONESIA Tbk. *Jurnal BISNIS & KEWIRAUSAHAAN*, 4(3).

Siregar, I. *Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Pemberdayaa Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, dan Citra Perusahaan PT. Vale Indonesia TBK Di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.*

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta.

Zulfida, I., Fauzi, A., Rustiadi, E., & Syaukat, Y. (2015). Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bandung. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), 307-318.

Artikel :

Ali Hamdan. 2020. Implementasi Menurut Para Ahli. http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%2005.pdf (diakses pada tanggal 10 januari 2021)

PT. Vale. 2019. PKPM, Akselerasi Kemandirian Masyarakat. <http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/program-pengembangan-sosial/sekilas-ptpm/Pages/default.aspx#:~:text=PKPM%20merupakan%20program%20ke mitraan%20antara,masyarakat%20di%20wilayah%20terdampak%20operasi> (diakses pada tanggal 05 januari 2021)

PT Vale. 2019. Bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meluncurkan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) periode 2018-2022.

<http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/program-pengembangan-sosial/berita/Pages/selamat-datang-pkpm.aspx> (diakses pada tanggal 05 januari 2021)

PT Vale. 2019. Bersama Pemkab Lutim Luncurkan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri.

<http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/news/id/Pages/pt-vale-development-program-of-self-sufficient-rural-areas.aspx> (diakses pada tanggal 10 januari 2021)

Dokumen :

Permendagri 96 Tahun 2017

Permen Desa N0. 5 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURUL AINUN, dilahirkan di Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 08 bulan Februari tahun 1998. Anak ke-Dua dari Enam bersaudara dari pasangan Baso Thalib dan Hapisah memiliki satu kakak Laki-Laki bernama Muh. Ismail Baso S.Si dan Tiga adik perempuan bernama Zulfiana Zaenab, NurulAsma, Nurul Akifah dan juga Satu adik laki-laki bernama Ahmad Absyar. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Unggulan Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1Towuti pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMAN1Towuti dengan jurusan Sains lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Peneliti juga aktif dalam dunia organisasi Ipma Lutim Komisariat Towuti dan organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Raya. Peneliti Aktif sebagai Bendahara umum Ipma Lutim Komisariat Towuti priode 2019-2020 dan sebagai Bidang Humas Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Raya priode 2018-2019.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Implementasi Program Kawasan Perdesaan Mandiri Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur".